



Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi

Nuzul Fikri Ramdani¹, Rozzy Appriochman²

^{1,2}Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Teknologi, Sumbawa, Indonesia
Email: ¹nuzulfikriramdan@gmail.com, ²rozzy.apriochman@uts.ac.id

Informasi Artikel

Submitted : 09-07-2025
Accepted : 25-07-2025
Published : 10-08-2025

Keywords:
Monetary Policy
Fiscal Policy
Economic Development
Economic Growth
Macroeconomic Stability

Abstract

Economic development is a multidimensional process that not only reflects an increase in per capita income but also entails structural transformations in social, institutional, and behavioral aspects of society. In the context of Indonesia, monetary and fiscal policies are two essential macroeconomic instruments that shape the direction and success of economic development. This study aims to analyze the contribution and effectiveness of both policies in fostering inclusive and sustainable economic growth. Employing a qualitative approach through literature review, this research examines academic publications, official reports, and secondary data sources. The findings indicate that monetary policy through interest rate management, money supply control, and exchange rate stabilization plays a critical role in maintaining price stability and supporting economic activity. Meanwhile, fiscal policy via government spending, subsidies, taxation, and public debt instruments contributes to reducing social inequality and enhancing public welfare. The synergy between these two policy domains is pivotal in achieving macroeconomic stability and promoting equitable national economic development. Therefore, the formulation and implementation of integrated, adaptive, and context-sensitive economic policies are crucial to respond effectively to both domestic and global economic dynamics.

Abstrak

Pembangunan ekonomi merupakan proses multidimensional yang tidak hanya mencerminkan peningkatan pendapatan per kapita, tetapi juga mencakup perubahan struktural dalam aspek sosial, kelembagaan, dan perilaku masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua instrumen utama yang memengaruhi arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan efektivitas kedua kebijakan tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini mengkaji berbagai literatur akademik, laporan resmi, dan data sekunder terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga, jumlah uang beredar, dan stabilitas nilai tukar berperan dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung aktivitas ekonomi. Sementara itu, kebijakan fiskal melalui instrumen belanja negara, subsidi, perpajakan, dan pembiayaan utang berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara kedua kebijakan ini menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas makroekonomi dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan. Oleh karena itu, perumusan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang terintegrasi, adaptif, dan kontekstual sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika ekonomi domestik dan global.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Stabilitas Makroekonomi.

1. PENDAHULUAN

Indikator kualitas suatu negara sering kali diidentikkan dengan kondisi perekonomiannya, khususnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Salah satu elemen penting yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut adalah pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan moneter diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan Produk Nasional Bruto (GNP) dari tahun ke tahun, namun juga mencakup dimensi yang lebih luas. Sifatnya multidimensi, meliputi aspek sosial, kelembagaan, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat. Arsyad (2010) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses jangka panjang yang menyebabkan meningkatnya pendapatan riil per kapita, disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan. Namun, kenaikan pendapatan semata tidak cukup untuk menyatakan adanya pembangunan ekonomi tanpa adanya perubahan struktur sosial, organisasi, serta sikap dan perilaku masyarakat (Todaro, 2003).

Di Indonesia, pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh dua instrumen utama kebijakan makroekonomi: kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dikelola oleh Bank Indonesia, sementara kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua kebijakan ini saling melengkapi dalam mewujudkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan moneter berperan menjaga kestabilan harga, mengendalikan inflasi, dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Indonesia saat ini menerapkan dua sistem moneter: konvensional dan syariah. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi melalui pengelolaan suku bunga, jumlah uang beredar, dan intervensi pasar. Salah satu contohnya adalah kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate dari 3,5% menjadi 6% selama 2022–2023. Langkah ini diambil untuk merespons inflasi global dan menjaga nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal seperti kenaikan suku bunga global dan ketidakpastian geopolitik. Meskipun sempat menghambat konsumsi dan investasi dalam jangka pendek, kebijakan ini efektif menekan inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan operasi pasar terbuka dan intervensi di pasar valuta asing untuk mengelola likuiditas dan kestabilan sistem keuangan nasional. Upaya ini mendukung kelancaran transaksi ekonomi dan menciptakan kondisi moneter yang kondusif bagi pertumbuhan jangka panjang.

Di sisi lain, kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pemerintah menggunakan instrumen fiskal seperti belanja publik, subsidi, insentif pajak, dan kebijakan utang untuk mendorong pertumbuhan, mengurangi ketimpangan, serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Salah satu contoh nyata keberhasilan kebijakan fiskal adalah pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada masa pandemi COVID-19 (2020–2022). Pemerintah mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk bantuan sosial, subsidi upah, dukungan bagi UMKM, program Kartu Prakerja, dan insentif fiskal bagi pelaku usaha. Kebijakan ini berhasil menjaga daya beli masyarakat, menahan kontraksi ekonomi lebih dalam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kembali ke zona positif pada tahun 2021 sebesar 3,7%.

Pemerintah juga menerapkan kebijakan tax holiday dan super deduction tax untuk menarik investasi di sektor strategis seperti manufaktur dan pendidikan vokasi. Upaya ini berhasil meningkatkan produktivitas industri pengolahan, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Baik kebijakan moneter maupun fiskal memiliki peran saling melengkapi dalam menciptakan stabilitas ekonomi makro. Keduanya tidak hanya berfokus pada indikator pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mendorong transformasi struktural dalam masyarakat. Jika kebijakan moneter menjaga stabilitas harga dan sistem keuangan, maka kebijakan fiskal memastikan pengalokasian sumber daya publik yang adil dan efektif untuk pembangunan.

Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, konsisten, dan responsif terhadap dinamika global dan domestik. Dalam konteks Indonesia, penerapan kebijakan-kebijakan tersebut menjadi fondasi penting bagi pencapaian kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau *library research*. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menggali, memahami, dan menganalisis secara mendalam berbagai teori, konsep, serta pandangan ilmiah dari para ahli yang telah dituangkan dalam berbagai literatur akademik. Studi pustaka menjadi pendekatan yang relevan dalam penelitian ini karena topik mengenai kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan pembangunan ekonomi memiliki cakupan teoritis yang luas dan telah banyak dibahas oleh para ekonom dan ilmuwan sosial dalam berbagai karya tulis ilmiah.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif melalui studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menyusun argumentasi berdasarkan sumber-sumber yang kredibel dan terverifikasi secara ilmiah. Melalui kajian terhadap literatur, peneliti dapat membandingkan berbagai pandangan, menelaah hubungan antar konsep, serta mengevaluasi relevansi kebijakan yang telah atau sedang diterapkan dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia. Penekanan utama dalam pendekatan kualitatif ini bukan pada pengukuran angka atau data statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap makna, prinsip, serta implikasi dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan secara langsung dari lapangan, tetapi dari sumber-sumber yang telah tersedia. Data sekunder yang dikumpulkan meliputi buku-buku akademik, artikel ilmiah, jurnal penelitian, laporan resmi institusi ekonomi dan keuangan, serta dokumen-dokumen kebijakan dari pemerintah dan bank sentral. Pemanfaatan data sekunder ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk mengakses berbagai informasi penting dan historis tanpa harus melakukan wawancara atau survei langsung.

Penggunaan data sekunder dalam studi pustaka ini sangat penting, mengingat pembahasan tentang kebijakan moneter dan fiskal memerlukan pemahaman yang kuat terhadap teori ekonomi serta dinamika kebijakan yang telah dilaksanakan pada masa lalu maupun masa kini. Misalnya, peneliti dapat merujuk pada hasil kajian akademik mengenai efektivitas kebijakan suku bunga, dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, atau peran kebijakan fiskal dalam penanganan krisis ekonomi. Semua informasi ini dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk melihat sejauh mana kebijakan moneter dan fiskal mampu memengaruhi pembangunan ekonomi Indonesia secara langsung maupun tidak langsung.

Melalui pendekatan ini pula, peneliti dapat menarik kesimpulan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga reflektif terhadap realitas empiris yang terjadi. Dengan kata lain, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kontribusi dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, studi pustaka ini menjadi fondasi penting untuk memahami peran strategis kebijakan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan adanya peningkatan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang, yang disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai

masyarakat dan struktur kegiatan ekonominya. Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi memiliki tiga sifat penting, yaitu (Tambunan, Diktat Ekonomi Pembangunan, 2020):

1. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita
2. Kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang
3. Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi secara terus menerus.

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi berarti suatu proses yang menyebabkan antara lain:

1. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, maupun sosial yang pada mulanya mengarah ke dalam suatu daerah menjadi berorientasi ke luar.
2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi membatasi jumlah keluarga.
3. Perubahan dalam kegiatan penanaman modal masyarakat, dari melakukan penanaman modal yang tidak produktif misalnya penanaman modal berupa emas, tanah maupun rumah menjadi digunakan untuk wiraswasta.
4. Perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat, dari semula ditentukan oleh kedudukan keluarga atau suku bangsa menjadi ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan pekerjaan
5. Perubahan dalam pandangan masyarakat yang mulanya berkeyakinan bahwasannya manusia ditentukan oleh keadaan alam sekitarnya, dan selanjutnya berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan.

Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian

Moneter ialah suatu bagian ilmu ekonomi yang didalamnya mempelajari mengenai sifat uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Ada begitu banyak aspek yang dibahas pada kajian moneter seperti sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit, serta peranan dan fungsi uang dan juga fungsi bank (Mujiatun, 2018). Kebijakan moneter adalah suatu media yang dipergunakan oleh Bank Sentral dalam rangka mengelola berbagai macam variabel keuangan seperti kurs rupiah dan nilai suku bunga. Dan tujuan utama nya tidak lain adalah untuk mencapai stabilitas mata uang baik itu dari faktor internal maupun eksternal nya. Adanya pemenuhan kebutuhan dasar, distribusi yang normal, pertumbuhan ekonomi riil dan stabilitas ekonomi merupakan beberapa contoh yang menjadi sasaran bank sentral dan membantu pencapaian bangsa dimasa yang akan datang. (Putri & Nasution, 2022)

Menurut Ahmad Mansur, implikasi atau dampak pembangunan yang dihasilkan dari kebijakan moneter mungkin dapat dibagi ke dalam dua kategori yang luas, yakni:

- a. Dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dan terjadi akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan tanpa tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
- b. Dampak pembangunan ekonomi yang dihasilkan dan terjadi akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan tindakan-tindakan aktif yang ditujukan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi dengan menggunakan piranti-piranti kebijakan moneter.

Pembangunan ekonomi ataupun perkembangan ekonomi ialah suatu proses yang mengakibatkan pendapatan perkapita penduduk mengalami peningkatan dalam jangka panjang dan diikuti dengan perubahan ciri-ciri penting dalam suatu masyarakat (modernisasi) (Tambunan, Diktat Ekonomi Pembangunan, 2020). Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut, kebijakan moneter hadir untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga, mempromosikan pertumbuhan

ekonomi yang sehat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Sementara instrumen kebijakan moneter yang digunakan yakni:

1. Menaikkan/menurunkan Suku Bunga Jika ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, bank menurunkan suku bunga, untuk mendorong investasi & konsumsi. Jika ingin mengendalikan inflasi, bank akan menaikkan suku bunga sehingga mengurangi pengeluaran dan membatasi pertumbuhan kredit.
2. Menambah/mengurangi Cadangan Bank (misal menjual/membeli SBN) Bank sentral dapat mempengaruhi likuiditas di pasar dengan membeli atau menjual surat berharga negara atau mata uang asing. Dengan menambah atau mengurangi cadangan bank, mereka dapat mengendalikan pasokan uang di perekonomian.
3. Menentukan Rasio Cadangan Wajib bank komersial (GWM: Giro Wajib Minimum) Bank sentral dapat menetapkan rasio cadangan wajib yang harus dipatuhi oleh bank-bank komersial. Dengan mengubah persentase cadangan yang harus disimpan, bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang yang tersedia untuk dipinjamkan oleh bank komersial.

Dari beberapa instrumen diatas, tentu akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Seperti namanya, kebijakan moneter mengatur bagaimana agar jumlah uang yang beredar tetap stabil serta meminimalkan inflasi baik yaitu dengan menaikkan dan menurunkan suku bunga. Inflasi tentu akan membuat tergerusnya nilai mata uang yang berdampak pada tidak cukupnya pendapatan masyarakat dikarenakan harga-harga yang semakin melonjak. Kebijakan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Suku bunga dapat berpengaruh terhadap investasi sektor industri yang akan mendorong produksi. Sedangkan nilai tukar berpengaruh terhadap harga yang meliputi produk dan input produksi. Suku bunga dan nilai tukar merupakan instrumen kebijakan moneter yang sangat memengaruhi perdagangan produk industri baik domestik maupun internasional. Jika yang dilakukan adalah meningkatkan money supply, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya jika money supply dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif (Said & Awaluddin, 2022).

Kebijakan Fiskal dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal terwujud dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam dokumen APBN, kita dapat melihat berapa pendapatan pemerintah, darimana saja pendapatan tersebut, komposisi pendapatan, penduduk mana atau siapa yang terkena beban tinggi dan beban rendah dari total pendapatan pemerintah, untuk apa saja pendapatan pemerintah, sektor mana yang mendapat alokasi pengeluaran tinggi dan mana yang rendah, dan sebagainya (Mujiatun, 2018).

Kebijakan fiskal yaitu bentuk langkah pemerintah dalam mengelola terhadap pengeluaran dan perpajakan atau dalam penggunaan instrumen fiskal dalam mempengaruhi jalannya sistem ekonomi agar dapat maksimum dalam kesejahteraan ekonomi. Lebih umumnya kebijakan fiskal disebut sebagai pengelolaan anggaran pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian contohnya kebijakan dalam perpajakan yang dipungut dan dihimpun, pembayaran transfer, dan yang mencakup dalam pemerintahan (Huda & dkk, 2008). Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai.

Stabilitas/keseimbangan pendapatan dengan pengeluaran, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi masalah seperti ketimpangan pendapatan dan pengangguran. Meskipun ada beberapa pilihan kebijakan fiskal, seperti berimbang, surplus, defisit, dinamis, namun instrumen kebijakan fiskal yang biasa digunakan antara lain:

1. Mengatur pengeluaran publik/belanja proyek untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan pengeluaran publik untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatkan belanja pada infrastruktur, pendidikan, atau proyek-proyek publik lainnya, pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memberikan Subsidi untuk industri tertentu. Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu seperti energi, pertanian, atau perumahan guna mendorong aktivitas ekonomi di sektor tersebut.
3. Menerapkan kebijakan Pajak. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran publik. Mereka dapat menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi, atau meningkatkan pajak untuk mengurangi defisit anggaran atau mengendalikan inflasi.
4. Menerapkan Kebijakan utang. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan hutang untuk mengatur pembiayaan publik. Mereka dapat meminjam dari pasar keuangan atau meluncurkan obligasi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek atau membayar defisit anggaran.

Kebijakan fiskal merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga. Sama hal nya seperti kebijakan moneter, kebijakan fiskal juga mengatur bagaimana agar inflasi dapat diminimkan. Peran kedua kebijakan ini adalah sama yakni sama-sama diterapkan untuk menstabilkan ekonomi negara yang terindikasi bermasalah. Dua kebijakan ini punya praktik yang berbeda. Kondisi perekonomian suatu negara yang tidak stabil akan memicu banyak masalah. Yang paling umum adalah tingkat kemiskinan yang semakin tinggi, banyaknya pengangguran, perusahaan-perusahaan mengalami kebangkrutan, bertambahnya utang negara, dan masalah-masalah lain. Untuk dapat mewujudkan pembangunan ekonomi, maka hal-hal diatas harus diatasi. Selain itu, hal tersebut bisa memicu aksi besar seperti kerusuhan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Kita bisa mengambil contoh krisis moneter tahun 1998. Tentu hal tersebut harus segera diatasi jika tidak ingin terjadi kembali. Kebijakan fiskal memungkinkan negara untuk mengambil pajak secara merata dan adil. Tidak mengherankan mereka yang masuk ke dalam kategori warga negara yang penghasilannya di atas rata-rata akan dibebani oleh pajak yang lebih besar. Sementara itu, mereka yang tidak menjadi wajib pajak bisa merasakan secara tidak langsung kebijakan ini. Lalu, ada juga kebijakan moneter yang terkait dengan keuangan negara. Pemerintah tidak bisa sembarangan memproduksi uang secara asal-asalan. Jika terlalu banyak jumlah uang yang beredar, hal itu akan memicu masalah lain yang juga cukup merepotkan, yaitu inflasi (Masrufah, 2022).

4. KESIMPULAN

Baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi. Keduanya bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, meskipun memiliki fokus dan instrumen yang berbeda. Kebijakan moneter lebih menitikberatkan pada pengelolaan keuangan, terutama terkait jumlah uang beredar, suku bunga, dan nilai tukar yang dikelola oleh bank sentral. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga, mengendalikan inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Sementara itu, kebijakan fiskal berkaitan langsung dengan pengelolaan anggaran negara, termasuk pendapatan dari pajak dan pengeluaran untuk sektor-sektor publik. Melalui belanja negara dan kebijakan perpajakan, pemerintah dapat memengaruhi tingkat konsumsi, investasi, dan distribusi pendapatan di masyarakat.

Meskipun keduanya memiliki peran masing-masing, kebijakan moneter saja tidak cukup untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan makroekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara bank sentral dan pemerintah menjadi kunci utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Heliany, I. (2021, March). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. In Prosiding Seminar Stiami (Vol. 8, No. 1, pp. 15-21).

Huda, Nurul. Dkk. Pendidikan Ekonomi Makro: Pendekatan Teoritis, (Kencana Prenada Media Group:Jakarta, 2008), h.175-176

Juneldi, J., & Sentosa, S. U. (2022). Efek Variabel Kebijakan Moneter Dan Fiskal Terhadap Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Di Indonesia. Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan, 4(2), 1-10.

Mansur, A. (2013). Kebijakan Moneter dan Implikasinya terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. Tsaqafah, 9(1), 57-74.

Masrufah, L. (2022). KEBIJAKAN MONETER FISKAL DALAM PEREKONOMIAN. Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine), 8(1), 7-22.

Mujiatun, S. (2014). Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 14(1).

Nangarumba, M. (2016). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, dan Penyaluran Kredit Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2016. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 8(2), 114-130.

Putri, I. A., & Nasution, E. O. A. (2022). KEBIJAKAN MONETER DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PEREPEKTIF EKONOMI ISLAM. Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 8(1), 166-183. Said, A., & Awaluddin, A. (2022). Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. MAGISTER RESEARCH, 1(2), 11-22.

Sinaga, A. S., Fuadi, A., & Sinaga, A. (2022). Peranan Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Periode 2012-2021. Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA), 62-71.

Tambunan, K., & Nawawi, M. I. (2018). Analisis Kausalitas Cranger Kebijakan Moneter Syari'ah Terhadap Perekonomian Indonesia. BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Said, A., & Awaluddin, A. (2022). Pengendalian Inflasi, Moneter dan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. MAGISTER RESEARCH, 1(2), 11-22. Islam, 5(2), 225-238

Raysharie, P. I., Alviandi, R., Marbun, E. T. N., Sirait, L. R. A., Azzahra, N., Mawardani, R., & Aulia, S. (2024). Pengaruh kebijakan fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi: Kasus studi dalam konteks ekonomi makro. Research Accounting and Auditing Journal, 1(2), 21-32.

Aristina, K., Juliprijanto, W., & Prasetyanto, P. K. (2020). Analisis Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2005-2018. DINAMIC: Directory Journal of Economic, 2(2), 403-414.

Yuliani, T. W., Mujib, M., & Lestari, M. (2024). Interaksi Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Economic and Education Journal (Ecducation), 6(1), 57-77.

Fahrezi, M. Z. (2024). ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PERIODE 2020-2022 (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).

Prasetyo, V. (2022). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2000–2020.